

**PARTISIPASI DALAM PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN
KELURAHAN TAAS KOTA MANADO**

Oleh:

Ferdinand Kalesaran

Ventje V. Rantung

Novi R. Pioh

e-mail: di_nand@yahoo.co.id

Summary

Participation in the National Program for Community Empowerment Urban Village Taas of Manado City. Participatory development model can be regarded as a form of reaction to management development paradigm or neo-liberalism is closely modeled on the many failures. The National Program for Community Empowerment or abbreviated Urban PNPM Urban embracing participatory development model where community participation becomes absolutely necessary in carrying out this program. The purpose of this study was to identify the types of community participation in PNPM Mandiri Urban sub-districts Taas Tikala Manado through the stages of planning and decision-making, implementation, benefits and evaluation of activities.

This study used qualitative methods with data sources through secondary data from village office and from the office of the Coordinator Manado city PNPM Urban. The primary data sourced from interviews to 14 informants as a representation of the village government, the head of the neighborhood, facilitators, and community. The data were analyzed descriptively through the stages of data reduction, data display and conclusion. Event check the validity of the data in a qualitative study, researchers used a test of credibility, transferability, dependability and confirmability.

The results showed that the activities in PNPM Urban cycle through the stages very well in encouraging community participation in planning and decision-making, implementation, and maintenance. Public participation in decision making through consultation activities planning and setting priorities. The implementation of the activities through Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), and the work done by mutual cooperation and self-sufficient. Results of activities including infrastructure Tridaya environmental, economic and social activities revolving loan productive, be especially beneficial for the community. Constraints that occur in community participation is at the stage of evaluation cycle activities through a participatory review and annual citizen consultation. Lack of free time and put their trust in Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), causing a lack of community participation in evaluating the activities.

The conclusion of this study is the village community Taas Tikala Manado city districts participate actively in decision-making, implementation, and benefits as well as the maintenance of the results of the activities, but still less involvement in the evaluation. It is recommended that people should take an active part in the evaluation, because at this stage is considered as feedback can provide input for the improvement of the implementation of the program/ further activity.

Keywords: Participation, the National Program for Community Empowerment Urban

Ringkasan

Model pembangunan partisipatif dapat dikatakan sebagai suatu bentuk reaksi atas manajemen pembangunan yang berparadigma atau bermodelkan neo-liberalisme yang banyak mengalami kegagalan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan atau disingkat PNPM Mandiri Perkotaan menganut model pembangunan partisipatif di mana partisipasi masyarakat menjadi syarat mutlak dalam menjalankan program ini. Tujuan penelitian ini untuk mengenali jenis-jenis partisipasi masyarakat dalam PNPM-Mandiri Perkotaan Kelurahan Taas kecamatan Tikala Kota Manado melalui tahapan perencanaan dan pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi kegiatan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber datanya melalui data sekunder dari kantor Kelurahan Taas dan dari kantor Koordinator Kota Manado PNPM Mandiri Perkotaan. Data primer

bersumber dari wawancara kepada 14 orang informan sebagai representasi dari pemerintah kelurahan, kepala lingkungan, fasilitator pendamping, dan masyarakat. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Kegiatan mengecek keabsahan data dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kegiatan dalam PNPM Mandiri Perkotaan melalui tahapan siklusnya sangat baik dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemeliharaan hasil kegiatan. Masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui rembuk perencanaan dan menetapkan prioritas kegiatan. Pelaksanaan kegiatan melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan pekerjaan dilakukan secara gotong royong dan berswadaya. Hasil kegiatan tridaya yaitu infrastruktur lingkungan, ekonomi pinjaman bergulir dan kegiatan sosial produktif dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kendala yang terjadi dalam partisipasi masyarakat berada pada tahapan siklus evaluasi kegiatan melalui tinjauan partisipatif dan rembuk warga tahunan. Kurangnya waktu luang dan menaruh kepercayaan kepada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), menyebabkan kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam melakukan evaluasi kegiatan/program.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Taas Kecamatan Tikala Kota Manado berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemanfaatan serta pemeliharaan hasil kegiatan, namun masih kurang keterlibatannya dalam evaluasi. Disarankan agar masyarakat harus mengambil bagian secara aktif dalam evaluasi, karena pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya.

Kata kunci: Partisipasi, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan.

PENDAHULUAN

Model pembangunan partisipatif dapat dikatakan sebagai suatu bentuk reaksi atas manajemen pembangunan yang berparadigma atau bermodelkan neo-liberalisme yang banyak mengalami kegagalan. Kebijakan pembangunan yang seperti ini lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan dimensi sosial-budaya masyarakat. Kebijakan ini biasanya terfokus hanya pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui *Gross National Product (GNP)* yang menekankan pada pertumbuhan dan melihat pembangunan sebagai pembangunan ekonomi, sehingga ukuran keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan produksi barang dan jasa secara nasional. Makin tinggi pertumbuhannya, makin berhasil pembangunan suatu bangsa/negara (Kenny, 1999).

Berangkat dari kegagalan-kegagalan masa lalu di beberapa negara yang manajemen pembangunannya sangat sentralistik dan memposisikan masyarakat sebagai penerima manfaat pasif, sehingga memunculkan koreksi-koreksi dari banyak ahli yang berpendapat bahwa keberhasilan pembangunan harus melibatkan masyarakat secara aktif. Manusia/masyarakat harus dibangun, diberdayakan dan dilibatkan dalam perencanaan-perencanaan pembangunan secara partisipatif. Konsep partisipasi dalam pembangunan di masyarakat Indonesia sendiri bukanlah hal yang baru didengungkan. Partisipasi itu sendiri tidak lebih sebagai upaya pihak pemerintah untuk memobilisasi masyarakat dalam melaksanakan dan menyukseskan kebijakan yang telah mereka buat. Contohnya, masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan melalui membayar pajak dan bergotong-royong untuk pembangunan yang telah ditetapkan dari atas, dan lain-lain.

Partisipasi yang sebenarnya diharapkan agar tujuan pembangunan di masyarakat boleh berhasil, maka program perencanaan, pelaksanaan kegiatan, bahkan monitoring dan evaluasi serta pemeliharaan hasil pembangunan benar-benar melibatkan masyarakat. Alasan logisnya, karena merekalah yang paling tahu akan permasalahan dan kebutuhan

dalam rangka membangun wilayahnya. Tjokroamidjojo (1995) menyimpulkan bahwa pembangunan nasional merupakan: (1) Proses pembangunan berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik dan lainnya; (2) Proses perubahan sosial yang merupakan proses perubahan masyarakat dalam berbagai kehidupannya ke arah yang lebih baik, lebih maju, dan lebih adil; (3) Proses pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat, atau adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Konteks di atas mengandung pengertian partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas pada masyarakat turut serta dalam melaksanakan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun harus dilibatkan sejak awal dalam perencanaan pembangunan di lingkungannya.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-Mandiri Perkotaan) lahir dari semangat *community empowerment* (pemberdayaan masyarakat), di mana partisipasi masyarakat menjadi konsekuensi logis dalam program. Artinya bahwa keterlibatan masyarakat banyak sangat diharapkan dalam program ini, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pemeliharaan serta pengembangan hasil-hasil kegiatan. Di Indonesia PNPM-Mandiri Perkotaan merupakan perubahan nama dari Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang telah dimulai dari pulau Jawa sejak tahun 1999. Tahun 2004 masuk ke Provinsi Sulawesi Utara di sebagian kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Manado, Tomohon, dan Kota Bitung masih dengan nama P2KP. Sejak tahun 2008, oleh pemerintah semua program-program pembangunan yang bernafaskan pemberdayaan masyarakat disatukan dalam PNPM-Mandiri, sehingga kita mengenal ada banyak jenis PNPM Mandiri seperti: PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Desa Tertinggal dan Khusus, PNPM Mandiri Pariwisata, dan sebagainya.

Fenomena yang terjadi di masyarakat awal masuknya PNPM-Mandiri Perkotaan disambut dengan antusias yang sangat tinggi, sehingga masyarakat turut terlibat/berpartisipasi dalam setiap tahapan program mulai dari kegiatan sosialisasi, indentifikasi, perencanaan serta pelaksanaan kegiatan. Seiring dengan waktu, khususnya di Sulawesi Utara, sampai sekarang telah memasuki tahun ke-11, nampak animo masyarakat mulai menurun untuk terlibat langsung dalam setiap tahapan sebagaimana aturan program. Banyak masyarakat yang dulunya memiliki animo yang besar dan selalu terlibat dalam segala tahapan mulai mengendur. Fenomena lain, nampak bahwa keikutsertaan masyarakat dalam program, terutama mereka yang tergolong dalam masyarakat miskin lebih cenderung hanya untuk mengakses bantuan dana dari pemerintah lewat program ini. Padahal, tujuan sebenarnya adalah kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan, sedangkan dana bantuan berupa uang ataupun bahan hanyalah merupakan stimulan (Pedoman Umum P2KP-3, 2005).

Indikasi lain dalam program PNPM Mandiri Perkotaan adalah partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan hasil-hasil kegiatan. Begitu antusiasnya masyarakat ketika menerima program dan merencanakan serta melaksanakan, namun setelah selesai kegiatan dan dimanfaatkan, masyarakat tidak memelihara atau merawatnya. Kegiatan yang dibiayai oleh program tak dapat bertahan lama dan cenderung dibiarkan. Padahal dalam tahap awal indentifikasi masalah, masyarakat sepakat untuk membangun dan menjaga atau merawat hasil-hasil kegiatan. Beberapa fenomena ini menimbulkan minat dan mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang Partisipasi dalam PNPM-Mandiri Perkotaan Kelurahan Taas Kecamatan Tikala Kota Manado. Kata partisipasi yang dimaksudkan dalam judul penelitian ini adalah partisipasi masyarakat, dan tujuan

penelitian untuk mengenali jenis-jenis partisipasi masyarakat dalam PNPM-Mandiri Perkotaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian partisipasi masyarakat dalam Kamus Tata Ruang (1998), adalah keterlibatan masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai subyek dan obyek pembangunan; keterlibatan dalam tahap pembangunan ini dimulai sejak tahap perencanaan sampai dengan pengawasan berikut segala hak dan tanggung jawabnya.

Akhir-akhir ini banyak studi yang secara khusus mendalami konsep partisipasi yang terfokus pada kajian pengembangan masyarakat. Menurut Warner (dalam Adiyoso, 2009), berkembangnya kajian partisipasi masyarakat ini telah menarik perhatian dunia ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan konferensi Internasional tahun 1992 dengan Agenda 21 di Rio de Janeiro yang mengembangkan program aksi untuk pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*. Program tersebut menitikberatkan pada konsultasi, akuntabilitas dan sumber daya. Gagasan tentang partisipasi masyarakat terus meningkat karena masyarakat di seluruh dunia menuntut hak untuk terlibat dalam proses pembangunan. Kebijakan dan praktek mengenai pemerintahan yang baik harus dilakukan, tidak hanya sekedar memastikan efektivitas pencapaian perekonomian, tapi juga harus menciptakan kesejahteraan manusia dan kesetaraan.

Peran serta masyarakat juga berhubungan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Abe (2002), berpendapat bahwa peran serta masyarakat adalah hak bukan kewajiban. Hal itu sudah dinyatakan dalam deklarasi PBB mengenai hak asasi manusia (Bab 21), bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk berperan serta dalam urusan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sama halnya dengan pendapat Kelly (2001), bahwa peran serta adalah serangkaian proses di mana masyarakat lokal dilibatkan dan berperan dalam isu yang berhubungan dengan mereka. Sampai di mana kekuasaan dibagi dalam pengambilan keputusan, tergantung jenis partisipasi tersebut.

Tujuan partisipasi masyarakat dapat berubah setiap waktu, tergantung lingkungannya. Menurut Kelly (dalam Adiyoso, 2009), awalnya partisipasi bertujuan untuk memberi kekuasaan kepada masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan di negara sedang berkembang. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi hidup masyarakat memaksa mereka untuk memainkan peran penting dalam pembangunan (Soetomo 2006). Sanoff (2000) berpendapat bahwa tujuan utama partisipasi adalah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan hak suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mendorong dan melibatkan masyarakat serta menyatukan tujuan.

Pretty dalam Wignyo A. (2009) membuat tipologi partisipasi dalam tujuh tingkatan berbeda, mulai dari partisipasi pasif ke mobilisasi sebagai berikut:

1. Partisipasi pasif. Masyarakat berpartisipasi melalui pesan yang disampaikan tentang apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi. Penyampaian pesan ini adalah sepihak oleh administrator atau pemimpin proyek tanpa mendengar tanggapan masyarakat. Informasi yang dibagikan hanya menjadi milik profesional luar (bukan masyarakat).
2. Partisipasi informatif. Masyarakat berpartisipasi dengan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dengan menggunakan pertanyaan survey atau pendekatan

- serupa. Mereka tidak mempunyai kesempatan untuk terlibat dalam proses, seperti temuan riset yang tidak bisa dibagi atau dicek kebenarannya.
3. Partisipasi melalui konsultasi. Masyarakat berpartisipasi dengan dikonsultasikan dan orang luar mendengar pendapat mereka. Profesional luar ini mendefinisikan problem dan solusinya, dan memodifikasi sesuai dengan respon masyarakat. Proses konsultasi ini tidak melibatkan dalam pembuatan keputusan, dan profesional luar tidak berkewajiban menampung aspirasi masyarakat.
 4. Partisipasi karena insentif material. Masyarakat berpartisipasi dengan memberi sumberdaya seperti tenaga sebagai imbalan makanan, uang atau bentuk insentif lain. Pendekatan ini banyak digunakan dalam pengelolaan lahan pertanian termasuk dalam kategori ini, petani menyediakan lahan tetapi tidak terlibat dalam proses eksperimen dan pembelajaran. Peran serta seperti ini biasa terlihat tapi penduduk tidak punya kepentingan lagi untuk memperpanjang aktifitas ini begitu insentifnya habis.
 5. Partisipasi fungsional. Masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk memenuhi tujuan yang berkaitan dengan proyek, atau menginisiasi organisasi sosial dari luar. Keterlibatan seperti ini cenderung tidak terjadi pada tahap awal siklus proyek atau perencanaan tapi setelah keputusan besar dibuat. Keterlibatan seperti ini cenderung tergantung pada fasilitator dan orang luar, walaupun mungkin nantinya bisa berubah menjadi mandiri.
 6. Partisipasi interaktif. Masyarakat berpartisipasi melalui pengamatan bersama, yang ditujukan pada penyusunan rencana kerja dan pembentukan organisasi lokal yang baru atau memperkuat lembaga yang ada. Ini cenderung melibatkan metodologi antar disiplin ilmu yang berasal dari berbagai perspektif dan mempergunakan proses pembejaraan sistematis dan terstruktur. Kelompok ini mengambil kendali atas keputusan, sehingga masyarakat dapat mempertahankan struktur-struktur atau praktek-prakteknya.
 7. Mobilisasi diri. Masyarakat berpartisipasi dengan berinisiatif tanpa ketergantungan pada lembaga luar untuk mengubah sistem. Mereka mengembangkan kontak dengan institusi luar untuk sumberdaya dan saran-saran yang mereka perlukan tapi tetap mempertahankan kontrol atas penggunaan sumber daya tersebut. Mobilisasi dan cara kerja kolektif seperti ini dapat atau tidak menyelesaikan ketimpangan distribusi baik terhadap kekayaan dan kekuasaan yang ada.

Lebih lanjut Cohen dan Uphoff (1977) membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu:

1. *Participation in Decision Making* (partisipasi dalam pengambilan keputusan)
2. *Participation in Implementation* (Partisipasi dalam pelaksanaan)
3. *Participation in Benefits* (Partisipasi dalam pengambilan manfaat)
4. *Participation in Evaluation* (Partisipasi dalam evaluasi).

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan, ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan

manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program. Cohen dan Uphoff (1977) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam menerima hasil pembangunan tergantung pada distribusi maksimal suatu hasil pembangunan yang dinikmati atau dirasakan masyarakat, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Bentuk partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dipilih karena permasalahannya belum jelas, masih remang-remang, bahkan malah masih gelap, dinamis, kompleks, holistik dan penuh makna, Sugiyono (2010). Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 1990), mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Data yang diperoleh adalah data primer yang bersumber dari wawancara kepada 14 orang informan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan PNPM Mandiri Perkotaan yaitu, Lurah, Kepala Lingkungan, dan anggota masyarakat kelurahan Taas, serta fasilitator pendamping tingkat kota Manado. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan-laporan resmi yang berasal dari berbagai sumber, seperti: kantor lurah maupun dari kantor Koordinator Kota PNMP Mandiri Perkotaan kota Manado.

Bogdan menjelaskan analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, kemudian menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Aktivitas dalam analisis data pada penelitian ini, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum PNPM Mandiri Perkotaan dalam implementasinya yaitu Peraturan Presiden nomor.13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, 2010). Pelaksanaan program ini mengharapkan seluruh elemen masyarakat dapat terlibat dan mengambil bagian secara partisipatif dalam setiap tahapan siklus mulai dari tahap pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil dan pemeliharannya, serta evaluasi. Keterlibatan kelompok perempuan dan masyarakat miskin juga adalah mutlak sebagai prasyarat program ini diimplementasikan di masyarakat. Program ini sebagai proses belajar

kepada masyarakat, setelah tahapan siklus identifikasi masalah, pembangunan LKM dan perencanaan, maka pemerintah menyiapkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebagai dana stimulan proses belajar selanjutnya. Masyarakat di sini belajar bersama bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan dengan dana BLM yang dialokasikan dari anggaran pusat (APBN) dan dana pendampingan dari pemerintah daerah (APBD). Dana tersebut disalurkan ke rekening LKM untuk selanjutnya diteruskan kepada kelompok-kelompok (KSM) yang telah disetujui sebagai pengelola atau pemanfaat kegiatan, baik kegiatan lingkungan (infrastruktur), ekonomi (dana bergulir) ataupun kegiatan sosial (sosial produktif).

Partisipasi masyarakat jika tidak ada, maka program ini tidak akan berjalan dengan semestinya, karena setiap tahapan siklus harus dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan didampingi para fasilitator kelurahan. Sesuai konteks ini, menurut Suparman dan Soerjono (1980), partisipasi masyarakat adalah sebagai keinginan kemauan, keikutsertaan, kesanggupan, kesadaran dari setiap warga masyarakat untuk melaksanakan usaha-usaha pembangunan guna tercapainya tujuan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah merupakan suatu proses, oleh karena itu pembangunan merupakan upaya yang dilakukan secara terus menerus, artinya bahwa dalam pembangunan itu partisipasi masyarakat akan berbarengan dengan proses itu sendiri.

Implementasi program PNPM Mandiri Perkotaan dilakukan dalam suatu proses yang relatif panjang yaitu lewat tahapan siklus. Tahapan siklus tersebut dapat dirangkum menjadi siklus identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan serta pemeliharaan hasil-hasil kegiatan dan monitoring-evaluasi. Sejalan dengan itu, Cohen dan Uphoff (1977) membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu:

1. *Participation in Decision Making* (partisipasi dalam pengambilan keputusan)
2. *Participation in Implementation* (Partisipasi dalam pelaksanaan)
3. *Participation in Benefits* (Partisipasi dalam pengambilan manfaat)
4. *Participation in Evaluation* (Partisipasi dalam evaluasi).

1. *Participation in Decision Making* (partisipasi dalam pengambilan keputusan).

Implementasi program PNPM Mandiri Perkotaan sangat sejalan dengan pendapat Cohen dan Uphoff (1977). Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Dikemukakan sebelumnya bahwa berdasarkan Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah salah satu program pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Bentuk intervensinya adalah melalui tahapan siklus yang harus dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri dengan dibantu secara teknis oleh fasilitator yang direkrut oleh pemerintah, bukan sebagai pelaksana, tetapi sebagai tenaga pendamping.

Tahapan siklus tersebut diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat mulai dari tingkat basis di lingkungan. Setelah diperkirakan sebagian masyarakat telah mengetahui tentang program ini, maka diadakanlah pertemuan di tingkat kelurahan yang dinamakan dengan Rembuk Kesiapan Masyarakat (RKM). Siklus RKM, masyarakat bermusyawarah untuk memutuskan apakah menerima atau menolak program ini yang dikuatkan dengan berita acara. Jika masyarakat menerima, maka konsekwensinya adalah menyiapkan relawan untuk mengawal proses-proses selanjutnya. Proses inilah awal terjadinya apa yang

disebut oleh Cohen dan Uphoff sebagai *Participation in Decision Making* (partisipasi dalam pengambilan keputusan). Partisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut tidak hanya terjadi pada proses RKM, namun sebagaimana pendapat dari Soeparman dan Soerjono (1980) di atas bahwa partisipasi masyarakat akan berbarengan dengan proses pembangunan itu sendiri. Tahapan siklus-siklus selanjutnya masyarakat terus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan seperti menyepakati tentang masalah-masalah kemiskinan yang ada di lingkungannya, siapa yang tergolong miskin, menyepakati yang menjadi prioritas pembangunan, dan lain-lain.

Menurut data yang ada dengan dilengkapi wawancara dari beberapa informan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini sangat tinggi. Masyarakat sangat aktif, terutama pada tahun-tahun pertama masuknya program, untuk mengikuti setiap pertemuan atau rembuk yang ada dan terutama kaum perempuan. Masyarakat sangat antusias menyampaikan pendapat-pendapatnya, dan usulan-usulan kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka membangun lingkungan dan kelurahannya. Semua usulan yang disampaikan oleh masyarakat didokumentasikan dan selanjutnya dibentuk tim Perencanaan Partisipatif yang disepakati dari masyarakat itu sendiri untuk menyusun dokumen Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM-Pronangkis) di tingkat kelurahan. Dokumen PJM-Pronangkis ini kemudian ditetapkan atau disahkan oleh kepala kelurahan dan akan menjadi acuan masyarakat lewat LKM dalam membuat kegiatan atau pembangunan yang ada di kelurahan.

Menariknya dalam program PNPM Mandiri Perkotaan ini dana BLM tidak dibagi rata di tiap-tiap lingkungan, namun berdasarkan skala prioritas yang diputuskan secara bersama-sama. Skala prioritas tersebut didasarkan pada faktor kemendesakan untuk dikerjakan atau dibangun, karena dana BLM per tahunnya hanya terbatas. Faktor kemendesakan yang menjadi pertimbangan karena antara lain, jika tidak dikerjakan atau dibangun segera, mungkin dapat membahayakan masyarakat sekitar, pemanfaatnya banyak warga miskin, dan lain-lain. Kebijakan itu memungkinkan ada lingkungan yang tidak mendapatkan porsi pembangunan, namun hal tersebut diputuskan oleh masyarakat secara bersama-sama atas dasar musyawarah dan mufakat dengan didasarkan rasa kebersamaan.

2. *Participation in Implementation* (partisipasi dalam pelaksanaan)

Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dan dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah dengan melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan bersama lewat KSM. KSM menjadi pelaksana kegiatan mulai dari penyusunan proposal kegiatan, pelaksanaan sampai pada membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan. Masyarakat pada umumnya berpartisipasi dengan memberikan bantuan tenaga kerja secara sukarela, material, konsumsi dan lain-lain.

Masyarakat tidak hanya dituntut untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan suatu rencana kegiatan pembangunan, tetapi juga dituntut untuk ikut serta dalam pelaksanaan, sehingga kegiatan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Masyarakat sebagai sumber pembangunan selain sebagai target pembangunan juga sebagai sumber pelaksana pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan menurut Pretty (1995) seharusnya lebih menekankan kepada kemauan sendiri secara sadar/mobilisasi diri untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas

pembangunan. Semua potensi manusia (tenaga kasar dan trampil serta dana) diarahkan bagi pelaksanaan pembangunan baik melalui swadaya gotong royong maupun sumbangan sukarela. Masyarakat sebagai salah satu unsur pelaksana pembangunan harus bertanggung jawab dalam aktivitas pelaksanaan pembangunan dengan jalan mengerahkan dukungan tenaga, keterampilan, dana serta fasilitas bagi program pembangunan yang telah ditetapkan dan menciptakan suasana kerjasama dengan pelaksana pembangunan lainnya. Pengerahan yang optimal dari potensi masyarakat bagi kepentingan pelaksanaan program perlu digali, dipelihara dan dikembangkan sehingga mampu menciptakan suasana kemasyarakatan yang mendukung pembangunan serta terwujudnya aktivitas yang kondusif dalam pelaksanaannya.

Wawancara kepada masyarakat ditemukan bahwa masyarakat sendirilah sebagai pelaksana kegiatan lewat KSM yang telah dibentuk dan disepakati bersama-sama. KSM menjadi penanggung jawab pelaksanaan sekaligus yang mengorganisir masyarakat untuk bersama-sama mengambil bagian dalam pelaksanaan pekerjaan atau pembangunannya. Masyarakat sendiri merasa bertanggung jawab untuk membantu dan terlibat dalam pekerjaan, meskipun mereka tidak mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut. Mereka bersama-sama bahu-membahu dalam membantu pekerjaan agar dapat cepat diselesaikan, sebagaimana pengakuan seorang ibu yang diwawancarai bahwa dia melakukan semuanya dengan ikhlas. Semuanya dilakukan bersama anggota masyarakat yang lain, karena dari awal mengetahui persis bahwa dalam program ini dana BLM hanya merupakan rangsangan bagi masyarakat untuk berswadaya. Hasil dari pembangunan akan dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri, sebagaimana dikatakan oleh Ife dan Tesoriero (2008), apabila yang dikerjakan yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka anggota masyarakat akan ikut berpartisipasi.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan juga terdorong oleh rasa keprihatinan dan rasa tanggungjawab antar sesama masyarakat, di mana ada sebagian masyarakat yang sangat minim akses infrastruktur seperti air bersih, jalan dan sebagainya. Mengacu dari apa yang dikatakan informan JD bahwa sebelum dibangun jalan setapak dan talud penahan longsor, akses jalan bagi masyarakat sekitar sangat tidak layak. Menurutny sudah ada beberapa anggota masyarakat yang sering mengalami kecelakaan ketika melintasi jalan tersebut karena berada di pinggir tebing dan licin jika hujan turun. Senada dengan JD, informan NM juga mengatakan bahwa sebelum dibangun jalan setapak, kondisi jalan yang dilalui masyarakat sangat memprihatinkan dan sangat berbahaya terutama jika turun hujan atau dilalui pada malam hari karena gelap. Lokasi itu juga merupakan daerah rawan longsor, dan sudah ada rumah yang terbawa longsor, namun tidak ada korban jiwa karena telah dikosongkan sebelumnya. Setelah dibangun jalan setapak dan talud penahan longsor maka untuk melintasi jalan tersebut sudah relatif aman dan bahaya longsor sudah dapat diminimalisir. Konteks ini sesuai dengan apa yang dikatakan Spencer (1989), bahwa di dalam partisipasi ada unsur tanggung jawab, dalam partisipasi sesungguhnya merupakan keterlibatan mental dan perasaan lebih dari pada hanya semata-mata keterlibatan jasmani. Di sini partisipasi masyarakat muncul karena merasa sepenanggungan dengan masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggalnya.

3. *Participation in Benefits* (partisipasi dalam pengambilan manfaat)

Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari prosentase keberhasilan

program. Cohen dan Uphoff (1977) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam menerima hasil pembangunan tergantung pada distribusi maksimal suatu hasil pembangunan yang dinikmati atau dirasakan masyarakat, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Selanjutnya Ndraha (1983) mengatakan bahwa partisipasi dalam menerima hasil pembangunan berarti: menerima setiap hasil pembangunan seolah-olah milik sendiri; menggunakan atau memanfaatkan setiap hasil pembangunan; mengusahakan; merawat, memelihara secara rutin dan sistematis, tidak dibiarkan rusak dengan anggapan bahwa kelak tidak ada bantuan pemerintah untuk pembangunan yang baru.

Program PNPM Mandiri Perkotaan berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan menyebutkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari dana BLM, lebih khusus kegiatan lingkungan (infrastruktur) harus memiliki ketahanan sampai dengan minimal 3 tahun. Membangun KSM sebagai pelaksana kegiatan di dalamnya harus dilengkapi dengan unsur operasional dan pemeliharaan. Unsur ini dalam KSM yang nantinya akan menjamin bahwa daya tahan hasil kegiatan yang dibangun dapat dimanfaatkan dalam waktu yang panjang dengan mengorganisir masyarakat dalam mengoperasikan hasil kegiatan maupun memelihara atau merawatnya. Penelitian yang dilakukan didapatkan ternyata partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil kegiatan atau pembangunan belum maksimal. Kenyataan masyarakat sangat antusias dalam menerima program, karena mengetahui akan ada bantuan yang akan diberikan di kelurahan untuk pembangunan, namun dalam pemeliharaannya masih ada hasil kegiatan yang terabaikan. Sebagian kegiatan yang telah selesai dibangun dimanfaatkan oleh masyarakat, namun tidak diikuti dengan pemeliharaannya dan dibiarkan menjadi rusak. Sebagian besar hasil pembangunan di kelurahan Taas, tetap terpelihara dengan baik misalnya air bersih, masyarakat pemanfaat membuat aturan bersama guna terus melestarikan hasil pembangunan tersebut. Aturan bersama yang dibuat adalah setiap pemanfaat membayar iuran yang disepakati untuk membiayai operasional dan pemeliharaannya. Begitu pula dengan pinjaman dana bergulir, masyarakat terus merawat kepercayaan yang telah diberikan LKM sehingga tingkat pengembaliannya 100 persen.

Pemanfaatan dan pemeliharaan hasil kegiatan berdasarkan wawancara yang dapat dirangkum ada juga kendala-kendalanya, baik yang bersifat teknis, maupun yang semata-mata masyarakat pemanfaat kurang peduli pada fasilitas yang telah dibangun. Aspek teknis terjadi misalnya, dalam pengelolaan air bersih tidak berjalan dikarenakan jaringan sumber listrik yang bermasalah, maupun kerusakan. Hasil wawancara ditemukan bahwa telah dilakukan fasilitasi oleh LKM dan kepala lingkungan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Lingkungan 1 misalnya, telah ada keluarga yang bersedia menalangi kendala dana untuk penambahan daya listrik dan akan diganti melalui pengelolaan iuran kelompok pengguna jika telah mencukupi. Permasalahan kerusakan mesin dilingkungan 5 telah disepakati oleh LKM untuk mengalokasikan dana pengadaan mesin baru di BLM tahun 2016.

4. *Participation in Evaluation (Partisipasi dalam evaluasi).*

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Bentuk partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya. Partisipasi aktif

masyarakat dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan sangat penting dan dibutuhkan dalam menjamin keberhasilan tujuan pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dapat diwujudkan dalam bentuk pengawasan yang bersifat preventif dan represif terhadap program pembangunan yang dilaksanakan, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka menjamin tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri.

Evaluasi dari Cohen dan Uphoff dalam implementasi program PNPM Mandiri Perkotaan secara jelas berada pada siklus tinjauan partisipatif dan Rembuk Warga Tahunan (RWT). Setiap akhir tahun, memasuki triwulan empat dalam program PNPM Mandiri Perkotaan berdasarkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis dilakukan evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan tersebut berupa tinjauan partisipatif untuk sekurang-kurangnya tiga hal yaitu: tinjauan program, tinjauan keuangan dan tinjauan kelembagaan. Tahapan siklus ini masyarakat bersama-sama panitia tinjauan partisipatif yang dibentuk melakukan refleksi bersama untuk melihat program-program yang telah direncanakan lewat rencana tahunan (renta).

Inti dari pada tinjauan program ini masyarakat mengevaluasi rencana program tahun berjalan yang berhasil dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan. Program yang belum dilaksanakan apakah perlu diprogramkan kembali pada tahun berikut dengan dana BLM atau diusulkan masuk ke Musrenbang, atau dimitrakan dengan pihak luar, dan sebagainya. Tinjauan keuangan lebih difokuskan pada pengelolaan keuangan biaya operasional dan pembukuan yang dikelola oleh sekretariat LKM, keuangan pinjaman dana bergulir yang dikelola oleh UPK-LKM dan hasil audit independen terhadap LKM. Begitu juga kelembagaan yang telah dibangun masyarakat yaitu LKM ditinjau menyangkut keaktifan keanggotaan yang telah disepakati dan dipilih langsung oleh masyarakat.

Rembuk Warga Tahunan (RWT) dilaksanakan setiap akhir tahun program dan biasanya jatuh pada bulan desember pada tahun berjalan. Pelaksanaan RWT tersebut di mana LKM menyampaikan hasil tinjauan partisipatif yang telah dilakukan oleh panitia yang telah dibentuk bersama masyarakat. Kesempatan inilah terjadi evaluasi oleh masyarakat tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, keberhasilan, kendala, dan sebagainya. Kegiatan RWT dilakukan dengan cara LKM mengundang seluruh komponen masyarakat untuk mendengarkan hasil tinjauan partisipatif tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sekaligus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Hasil penelitian, setiap tahunnya LKM melaksanakan RWT di akhir tahun sesuai dengan ketentuan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan. Mengacu dari data kehadiran yang ditemui jumlah kehadiran masyarakat tidak signifikan, padahal menurut koordinator LKM, mereka telah menjalankan undangan kepada masyarakat melalui surat yang turut diketahui dan ditandatangani pemerintah kelurahan. Hasil wawancara dengan beberapa anggota masyarakat, mereka merasa tidak perlu hadir dalam rapat karena antara lain, percaya kepada koordinator LKM sebagai tokoh masyarakat yang baik dan dipercaya. Selain itu, beberapa anggota masyarakat mengatakan tak punya waktu mengikuti rapat, capek bekerja dan tidak memiliki kapasitas ikut dalam rapat.

Pelaksanaan pada tahapan ini seperti yang dikatakan Pretty (1995), dalam tipologi jenjang partisipasinya belum memenuhi syarat yang diharapkan. Menurut Pretty ada tujuh tingkatan yang berbeda dalam partisipasi masyarakat mulai dari tingkatan partisipasi yang paling rendah yaitu partisipasi pasif ke tingkatan partisipasi yang paling tinggi yaitu mobilisasi. Mobilisasi yang dimaksud di sini adalah, bagaimana masyarakat berpartisipasi

dengan berinisiatif tanpa ketergantungan pada lembaga luar untuk mengubah sistem. Masyarakat secara sadar bersama-sama menjalankan pembangunan dan sekaligus melakukan evaluasi atau kontrol dalam proses pelaksanaannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat tinggi. Proses pengambilan keputusan adalah melalui tahapan siklus Rembuk Kesiapan Masyarakat (RKM), refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya, pembangunan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), perencanaan partisipatif dan penentuan skala prioritas kegiatan. Masyarakat ditempatkan sebagai subyek pembangunan, di mana masyarakat sendiri yang melaksanakan kegiatan mulai dari tahapan identifikasi, perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), monitoring dan evaluasi kegiatan. Diorganisir Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) bersama-sama dalam melaksanakan pekerjaan dengan bergotong royong. Hasil kegiatan telah dimanfaatkan dan dirawat atau dipelihara dengan membuat aturan yang disepakati bersama. Ada beberapa hasil kegiatan tidak dimanfaatkan secara maksimal dan tidak terpelihara. Sebagian masyarakat hanya mau menerima manfaat hasil kegiatan namun tidak peduli merawat atau memelihara. Setiap akhir tahun pelaksanaan kegiatan dievaluasi dalam tahapan siklus tinjauan partisipatif dan diakhiri dengan Rembuk Warga Tahunan (RWT). Partisipasi masyarakat dalam melakukan evaluasi kegiatan tingkat kehadiran rendah, dikarenakan berbagai hal seperti kesibukan, tak punya waktu, merasa diri tidak punya kapasitas, percaya kepada Lembaga Keswadayaan Masyarakat, dan lain lain.

Saran

Didasarkan pada simpulan di atas, maka disarankan agar model pengambilan keputusan dalam PNPM Mandiri Perkotaan perlu diadopsi oleh pemerintah dalam pembangunan kelurahan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Pengambilan keputusan tidak boleh hanya dilakukan oleh sebagian elit kelurahan, tetapi perlu dilakukan rembuk-rembuk khusus untuk masyarakat miskin dan kaum perempuan agar bisa mengakomodir kepentingan mereka. Pemerintah kota perlu membuat program dan menganggarkan dana untuk merangsang kegiatan-kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat yang mendorong pelestarian budaya gotong royong dalam pembangunan kelurahan. Rasa memiliki terhadap hasil-hasil kegiatan harus terus dibangun bersama masyarakat agar dapat dimanfaatkan dan dipelihara secara maksimal. Aturan pemanfaatan menyangkut hak dan kewajiban harus disepakati bersama sejak awal dimulainya kegiatan. Selanjutnya, pemerintah kelurahan bersama LKM perlu mengsosialisasikan secara intens tentang pentingnya masyarakat terlibat dalam evaluasi kegiatan untuk kepentingan pembangunan ke depan. Pelaksanaan rembuk evaluasi kegiatan harus mempertimbangkan waktu luang masyarakat, agar pelaksanaannya lebih efektif.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abe, A. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo: Pondok Edukasi.
- Adiyoso, Wignyo, 2009. *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Surabaya: ITS Press.
- Cohen, J.M, and N.T. Uphoff. 1977. *Rural Development Participation*. New York: Ithaca.
- Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2010. *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan*.
- Ife, Jim dan Tesoreiro, Frank. 2008. *Community Development: Alternative Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kenny, S. 1999. *Developing communities for the future: community development in Australia*. 2nd ed. Melbourne: Nelson ITP.
- Moleong, Lexy J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ndaraha, Taliziduhu. 1983. *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Di Beberapa Desa*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma, IIP.
- Sanoff, H. 2000. *Community Participation Methods in Design and Planning*. Brisbane: John Wiley & Sons, Inc.
- Soefaat, et al. 1998. *Kamus Tata Ruang*. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia.
- Soetomo, 2006. *Stretegi-strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Spencer, L.J. 1989. *Winning Through Participation*. Kendal Hunt Publishing Company, USA.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparman dan Soerjono, S. 1980. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.